

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PACU JALUR SEBAGAI WATERFRONT CITY TELUK KUANTAN

Dylla Novrilasari

*Alumni Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru,
Jl. Pattimura No.09.Gobah, 28131. Telp 0761-23742.*

Zulfan Saam

*Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru,
Jl. Pattimura No.09.Gobah, 28131. Telp 0761-23742.*

Aras Mulyadi

*Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru,
Jl. Pattimura No.09.Gobah, 28131. Telp 0761-23742.*

The Strategy of to Develop Pacu Jalur Area as a Waterfront City of Teluk Kuantan

ABSTRACT

Teluk Kuantan is a capotal city of Kuantan Singingi, regency it has potency of natural resources which can be improved to tourism area, conservation area, residence`area that help economy of people and`also to realize an eternity of envirointment. Kuantan river is one of natural resources that can be used to increase economy and people welfane of Teluk kuantan. Kuantan river that belongs of the Teluk Kuantan city.Has an important part in social development, culture, and economy of Teluk Kuantan, that could be a center of government which has the waterfront city konsep. This reserach was intended to know the condition of Kuantan river environment in legal aspek, biophysics aspek, and human society, it has potency of not and what is the problem of pacu jalur area to be waterfront city and to find out the some alternatives development that probably can be performed through optimal and continuosly. Model development is made according to the ecology aspect, culture-social aspect, economy aspek and commite aspect which is used Analytical Hierarchy Processs (AHP). Based on the result of this research, Pacu Jalur area had potency as a waterfront city development. Model development waterfront city can be seen from legal aspect and biophysic that classified into three zone including, natural zone, semi-natural zone, and multi purpose zone. According to AHP assesment, then the alternative strategy development Pacu Jalur area as Teluk Kuantan waterfront city for development of community; development area; revitalisasi river; increasing of coordination stakeholders; law enforcement, and policy socialization.

Keywords: *Pacu jalur area, waterfront city, Teluk Kuantan*

PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Setiap kabupaten harus mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya untuk pembangunan ekonomi di daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat daerah, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Teluk Kuantan adalah Sungai Kuantan. Sungai adalah elemen yang penting bagi manusia. Sejak dahulu manusia mempunyai hubungan yang erat dengan sungai karena sungai memiliki peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Begitu juga dengan Sungai Kuantan yang berada di Kota Teluk Kuantan memiliki peranan yang penting dalam perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi Kota Teluk Kuantan.

Kota Teluk Kuantan yang merupakan ibukota kabupaten sekaligus sebagai pusat pemerintahan dengan konsep *waterfont city*. Kota menghadap ke Sungai Kuantan telah dibangun berbagai infrastruktur seperti Taman Jalur yang merupakan taman tempat bermain dan bersantai bagi masyarakat. Hutan Kota yang juga sebagai kawasan konservasi, jembatan yang

menghubungkan kota ke daerah seberang sungai. Di pinggir sungai juga dibangun turap penahan tebing, yang berfungsi sebagai pengaman tebing supaya tidak longsor akibat erosi arus sungai dan sekaligus sebagai tempat wisatawan lokal maupun domestik menyaksikan pacu jalur yang diadakan pada bulan Agustus setiap tahun. Berbagai aktivitas yang telah ada di sepanjang sungai akan berakibat buruk dan tidak mampu memberikan jaminan keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut perlu diketahui kondisi aktual Sungai Kuantan terutama yang berada disekitar kawasan pacu jalur baik potensi yang dimiliki dan permasalahan yang tengah dihadapi dari aspek biofisik, legal, infrastruktur, dan sosial masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, perlu adanya penelitian tentang kajian pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi lingkungan Sungai Kuantan ditinjau dari legalitas sungai, aspek biofisik, infrastruktur dan sosial masyarakat baik potensi dan permasalahan yang terdapat di Kawasan Pacu Jalur untuk pengembangan *waterfront city* Teluk Kuantan. Menemukan beberapa alternatif pengembangan yang mungkin dilakukan agar pemanfaatan sumberdaya wilayah kawasan pacu jalur dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan rencana pengembangan dan pemanfaatan *waterfront city* untuk industri pariwisata dan peningkatan perekonomian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sungai Kuantan khususnya arena pacu jalur Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilaksanakan pada

bulan Oktober 2012. Pemilihan lokasi penelitian di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah dipilih secara *purposive* (sengaja), dengan pertimbangan bahwa Kota Teluk Kuantan terletak dipinggir sungai yang dimanfaatkan sebagai arena pacu jalur yang diadakan rutin sekali dalam satu tahun. Lokasi yang dijadikan titik pengamatan penelitian dilaksanakan di daerah yang berada di sekitar arena/kawasan pacu jalur, yaitu Desa Seberang Taluk, Seberang Taluk Hilir, Desa Sawah, Desa Koto Taluk, Desa Pulau Aro, dan Kelurahan Pasar Taluk.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengambilan contoh atau sampling untuk penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu *random sampling dan purposive sampling*. *Random sampling* digunakan untuk mengetahui persepsi dan preferensi masyarakat pada lokasi penelitian yang diambil berdasarkan jumlah populasi di daerah penelitian. Sedangkan teknik pengambilan contoh yang digunakan untuk menganalisis beberapa alternatif pengembangan waterfront city, dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih adalah pelaku baik individu maupun lembaga yang dinilai mengerti permasalahan penelitian yaitu tentang kawasan pacu jalur Teluk Kuantan dan *waterfront city*.

Rencana pengembangan dalam penelitian ini akan dikaji dari aspek legal, aspek biofisik dan aspek sosial.

1. Aspek Legal

Aspek legal merupakan aspek yang dianalisis untuk menentukan batas kawasan perencanaan pengembangan. Aspek legal yang di analisis adalah Peraturan Pemerintah yang terkait masalah sungai, sempadan sungai dan Garis Sempadan Sungai (GSS) dan kebijakan –

kebijakan daerah yang terkait dengan sungai dan *waterfront city*.

2. Aspek Biofisik

Analisis aspek biofisik dengan dua cara yaitu analisis kualitas air sungai dan fisik sungai. Analisis kualitas air sungai berdasarkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh BLHPI Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 dan dibandingkan dengan PP. No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Adapun fisik sungai dilakukan analisis terhadap Ruang Terbuka Hijau dan infrastruktur sungai. Analisis ini menggunakan metode deskriptif, berdasarkan data yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

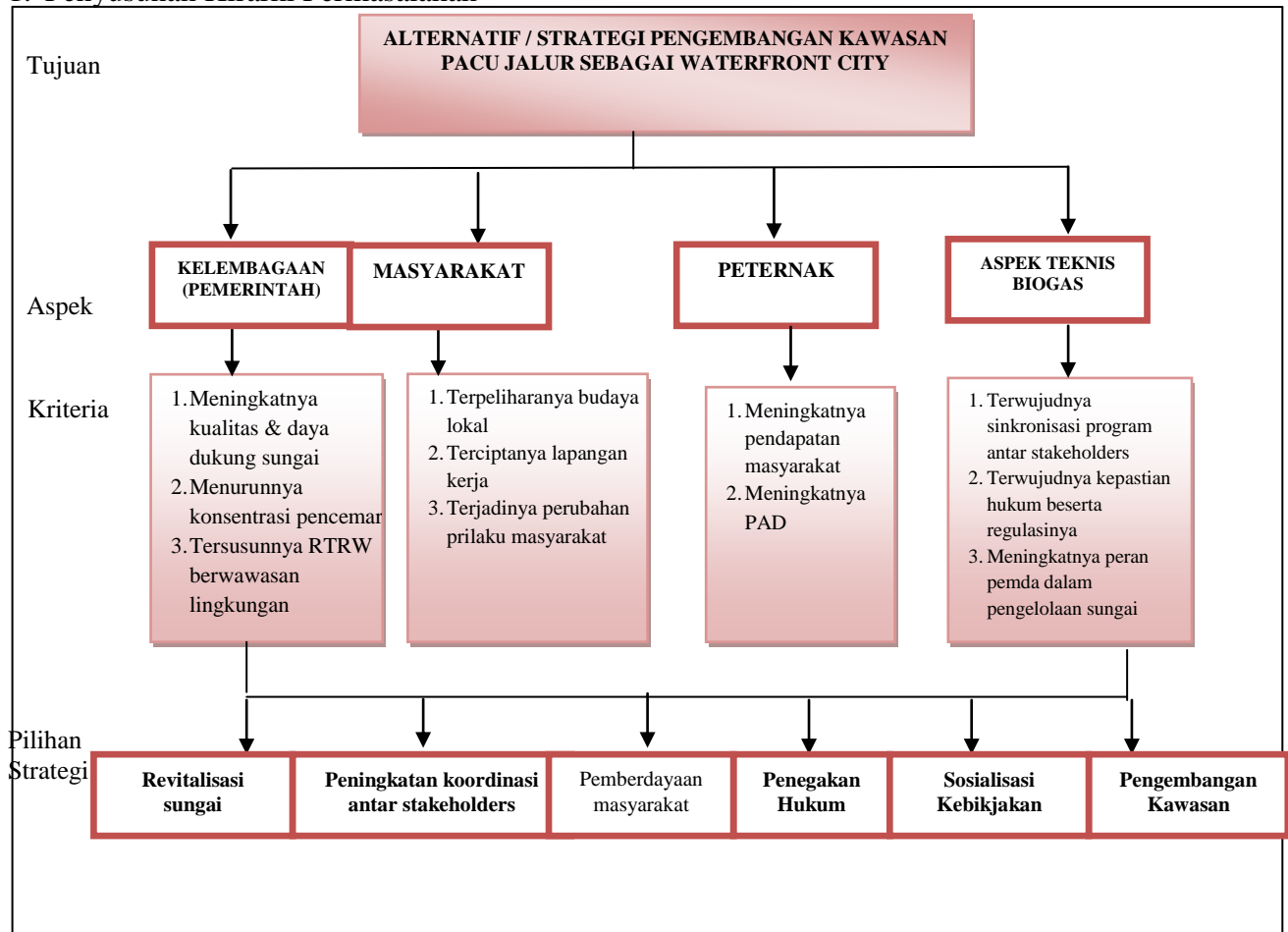
3. Aspek Sosial

Analisis aspek sosial dilakukan untuk mengetahui persepsi dan preferensi masyarakat terhadap keberadaan Sungai Kuantan. Analisis aspek sosial diperoleh melalui *indepth-interview* dengan perpaduan kuisisioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuisisioner ini menggunakan Skala *Likert* dengan alternatif jawaban bervariasi sesuai dengan variabel yang akan diukur. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur persepsi dan preferensi masyarakat.

4. Alternatif/ strategi kebijakan menggunakan AHP.

Dalam menentukan strategi yang harus dilakukan untuk pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* dengan metode AHP ini telah dibuat kerangka alur berpikir pengambilan kebijakan atau keputusan. Dari kerangka ini disusunlah kuisisioner yang akan ditanyakan kepada sejumlah responden yang telah ditentukan. Data yang dikumpulkan berupa data perbandingan berpasangan dengan skala Saaty 1-9. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan perangkat lunak *Expert Choise*, sehingga menghasilkan output alternatif keputusan sebagaimana yang diharapkan.

1. Penyusunan Hirarki Permasalahan



Gambar 1. Struktur AHP Strategi Pengembangan Kawasan Pacu Jalur sebagai Waterfront city Teluk Kuantan

2. Menentukan vektor prioritas merupakan skala penilaian untuk ditunjukkan pada Tabel 1 yang pengisian kuisisioner (Saaty, 1993).

Tabel 1. Skala Penilaian untuk Pengisian Kuisisioner

Tingkat Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Sama Penting	Dua elemen menyumbangkan sama besar pada sifat itu.
3	Sedikit lebih penting	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya.
5	Jelas lebih penting	Pengalaman dan pertimbangan kuat menyokong satu elemen atas elemen lainnya.
7	Sangat jelas lebih penting	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominannya telah terlihat dalam praktek.
9	Pasti/mutlak lebih penting	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas elemen yang lain memiliki tingkat

Tingkat Kepentingan	Definisi	Penjelasan
	(kepentingan yang ekstrim)	penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.
2,4,6,8	Jika ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan	Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan.
1/(1-9)	Kebalikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1-9	

Sumber: Saaty, 1993

Dalam perkembangannya AHP memiliki sejumlah kelebihan yaitu memiliki kemampuan untuk memodelkan masalah yang tidak terstruktur, menyelesaikan masalah terukur (kuantitatif) maupun pendapat (*judgment*) serta telah diakui memiliki tingkat kesahihan atau akurasi yang tinggi. Dengan sejumlah kemampuan ini AHP telah menjadi pilihan utama bagi para pengambilan keputusan, baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah untuk memahami kondisi serta membantu melakukan prediksi dan pengambilan keputusan.

Data yang dikumpulkan berupa data perbandingan berpasangan dengan skala Saaty 1-9. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan program *Expert Choice* sedemikian sehingga menghasilkan output alternatif keputusan sebagaimana yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rencana Pengembangan

1. Aspek Legal

Aspek legal merupakan aspek yang dianalisis untuk menghasilkan batas kawasan perencanaan pengembangan *waterfront city*. Dalam hal ini, ada beberapa Peraturan Pemerintah yang ditinjau untuk menentukan batas kawasan perencanaan pengembangan kawasan yang

terkait masalah sungai dan Garis Sempadan Sungai.

A. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Pasal 5 tentang sungai :

1. Garis Sempadan Sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lahan sekurang – kurangnya 5 meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul
2. Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang
3. Garis Sempadan Sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang

B. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 pasal 56 ayat 2 huruf B tentang RTRW:

1. Daratan tepi sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar
2. Daratan tepian sungai besar tidak bertanggung sebelah luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 meter dari tepian sungai
3. Daratan sepanjang anak sungai tidak bertanggung di luar`kawasan permukiman

dengan lebar paling sedikit 50 meter dari tepi sungai.

C. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pasal 16 mengenai kriteria sempadan sungai

1. Sekurang – kurangnya 100 meter kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman.
2. Untuk kawasan permukiman di luar sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk jalan inspeksi antara 10 – 15 meter

D. Peraturan Menteri PU Nomor 63/PRT/1993

1. Garis sempadan sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang – kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul
2. Garis sempadan sungai bertanggung didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang – kurangnya 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul

E. RTRW Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi termasuk ke dalam wilayah DAS Kuantan dan DAS Singingi yang menyebabkan wilayah kabupaten ini memiliki aliran sungai yang cukup banyak. Keterbatasan lahan dan perkembangan penduduk yang terus bertambah menyebabkan lahan sekitar sungai menjadi pilihan aktivitas. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negative seperti tercemarnya kualitas air sungai, berkurangnya estetika kawasan tepi sungai, serta menjadi penyebab banjir karena terjadinya pendangkalan dan penyempitan lebar sungai.

Dalam rangka mencegah terjadinya kondisi tersebut, maka diperlukan pengelolaan kawasan sungai dengan penetapan sempadan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Keppres 32 Tahun 1990, yaitu sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:

1. > 100 meter di kiri kanan sungai besar
2. 50 meter di kiri kanan sungai yang berada di dalam permukiman
3. 10 – 15 meter kiri kanan untuk jalan inspeksi

Kawasan pacu jalur terdiri dari dua sisi yaitu sisi 1 yaitu daerah kota dan sisi 2 daerah seberang sungai. Sisi 1 terdiri dari Desa Koto Taluk, Desa Sawah, Desa Pulau Aro, dan Kelurahan Pasar Taluk. Sedangkan sisi 2 yaitu Desa Seberang Taluk dan Seberang Taluk Hilir. Kondisi aktual di tiap sisi dari aspek legal dapat dilihat pada Tabel 2.

2.Aspek Biofisik

Kualitas Air Sungai Kuantan, Analisis kualitas air Sungai Kuantan yang dilakukan oleh Balai Lingkungan Hidup Promosi dan Investasi (BLHPI) Kabupaten Kuantan Singingi periode September 2012 di Kecamatan Kuantan Tengah dilakukan pada dua stasiun yaitu Stasiun Pulau Banjar dan Stasiun Pulau Komang. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa air Sungai Kuantan masih tergolong tercemar ringan, karena ada beberapa parameter tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data dilapangan, kualitas Sungai Kuantan juga dipengaruhi oleh kondisi beberapa anak sungai yang bermuara di Sungai Kuantan, antara lain Sungai Sinambek, Sungai Petapahan, Sungai Teso, Sungai Kukok, Sungai Langsung, Sungai Amut. Menurunnya kualitas Sungai Kuantan ini selain disebabkan oleh berbagai aktivitas yang telah ada di sepanjang sungai dan pengaruh anak sungai yang bermuara di Sungai Kuantan, juga disebabkan imbas dari kondisi lingkungan di hulu sungai.

Permasalahan utama yang terjadi di hulu adalah deforestasi karena kegiatan logging, land clearing dan konversi lahan menjadi areal budidaya, terutama perkebunan sawit, serta penambangan tanpa izin

(PETI). Penambangan emas ilegal yang dilakukan masyarakat di anak sungai yang berada di area perkebunan maupun di pinggir sungai mengakibatkan air sungai tercemar dan ikan banyak yang mati.

Tabel 2. Kondisi Aktual Tiap Sisi (Desa/Kelurahan) Berdasarkan Aspek Legal

Sisi	Desa/Kel	RTRW Kabupaten	Kuansing	Kondisi Aktual
		GSS Bertanggung (5m)	GSS Tidak Bertanggung (100m)	
1	Koto Taluk	Memenuhi	Memenuhi	<p>Sebagian besar wilayah Desa Koto Taluk memenuhi aspek legal karena jarak pemukiman lebih dari 5 m dari tanggul. Tanggul yang dibuat menggunakan kontruksi beton berupa turap. Tepi sungai yang telah ditanggul dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat menonton pacu jalur jika ada perlombaan dan tempat bersantai menikmati suasana Sungai Kuantan. Berdasarkan hasil pengamatan ada beberapa tanggul yaitu turap penahan tebing dekat Masjid yang rusak karena bangunan yang sudah tua dan keadaan banjir jika air pasang mempengaruhi kondisi turap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian kecil wilayah Desa Koto Taluk yang tidak bertanggung memenuhi syarat, karena tidak ada rumah penduduk dilokasi ini, tetapi aktivitas di tepi sungai yaitu penambangan pasir (galian C) <i>illegal</i> tetap berjalan dan ada beberapa lokasi yang juga telah mengalami erosi tebing.
	Pulau Aro		Tidak Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak pemukiman penduduk bervariasi antara 10 – 50 m dari tepi sungai. Sempadan sungai sebagian dimanfaatkan penduduk setempat sebagai lahan perkebunan, dan tempat melepaskan ternak seperti kambing, sapi, dan ayam. Tepi sungai juga dimanfaatkan sebagai tempat memancing dan membuang/membakar sampah rumah tangga.
	Sawah	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian lokasi Desa Sawah memiliki tanggul, karena termasuk arena pacuan jalur dan tempat menonton pacu jalur karena ada turap dipinggir sungai. Sebagian penduduk memanfaatkan turap sebagai tempat wisata kuliner jika tidak ada perlombaan. Kawasan yang bertanggung di desa sawah memenuhi aspek legal. • Sedangkan kawasan yang tidak bertanggung di Desa Sawah ini tidak memenuhi aspek legal karena sempadan di daerah ini digunakan sebagai rumah penduduk dimana jaraknya 3 – 20 m dari tepi sungai, dan ada beberapa rumah

		Memenuhi		<p>penduduk yang menjadikan sungai sebagai halaman belakang. Sempadan sungai yang tidak bertanggung ini juga dimanfaatkan penduduk sebagai lahan berkebun, penambangan pasir, dan membuang dan membakar sampah rumah tangga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Kelurahan Pasar Taluk yang berada dipinggir sungai kuantan memiliki tanggul berupa turap yang digunakan masyarakat sebagai tempat menonton pacu jalur dan tempat bersantai di bawah pohon – pohon dipinggir turap, serta ada tempat wisata kuliner disepanjang sungai yang dilengkapi dengan taman kota jalur dan dekat dengan ruko – ruko. Lokasi ini memenuhi aspek legal dengan sempadan bertanggung yang jarak pemukiman atau bangunan 5-10 m dari tanggul.
2	Seberang Taluk	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Seberang Taluk sebagian besar sudah memiliki tanggul berupa turap atau tangga batu yang dimanfaatkan masyarakat tempat menonton pacu jalur. Lokasi yang sudah memiliki tanggul ini memang memenuhi aspek legal dengan jarak pemukiman penduduk yang bervariasi, tetapi letak rumah penduduk yang masih ada membelakangi sungai. • Sebagian kecil lokasi Desa Seberang Taluk juga ada yang tidak bertanggung. Jarak pemukiman penduduk bervariasi antara 5 – 10 m dari tepi sungai dan tidak memenuhi aspek legal. Sempadan sungai dimanfaatkan penduduk sebagai lahan berkebun dan tempat melepaskan ternak, serta ada sebagian lokasi sebagai halaman belakang rumah penduduk. • Sempadan pada daerah ini digunakan sebagai rumah penduduk dimana jaraknya bervariasi antara 5-30 m dari tepi sungai. Sebagian kecil rumah penduduk juga membelakangi sungai, dan sebagian besar menghadap ke sungai. Sempadan sungai juga digunakan untuk bercocok tanam, seperti palawija, sayur – sayuran dan buah – buahan, dan ada juga penduduk yang membuang atau membakar sampah rumah tangga ke tepi sungai. Selain itu, ada beberapa lokasi di Desa Seberang Taluk hilir ini dimanfaatkan sebagai tempat penambangan pasir. Berdasarkan hasil pengamatan tepi sungai kawasan ini telah mengalami erosi tebing di beberapa tempat.
	Seberang Taluk Hilir		Tidak Memenuhi	

Sumber: Hasil survey, 2013

B. Ruang Terbuka Hijau di Teluk Kuantan

Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengisyaratkan setiap kota harus menisakan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari total wilayah dan direncanakan, maka kebutuhan ruang terbuka hijau yang harus dipenuhi oleh Kota Teluk Kuantan sebesar 5.397,90 Ha. Untuk memenuhi kebutuhan RTH ini bisa diambil dari luasan daerah konservasi seperti daerah berupa hutan lindung, hutan produksi maupun daerah dengan kemiringan 25 – 40 % atau lebih.

Ruang Terbuka Hijau ini sangat mempengaruhi kondisi fisik Sungai Kuantan untuk pengembangan kawasan pacu jalur sebagai waterfront city Teluk Kuantan. Fasilitas taman dan ruang terbuka hijau selain sebagai daerah penyanggah juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan olah raga, yang akan mendukung pengembangan waterfront city kawasan pacu jalur Teluk Kuantan. Kondisi Taman Jalur pada sore dan malam hari, serta Hutan Kota Pulau Bungin.

C. Infrastruktur Sungai

Infrastruktur sungai pada saat ini yang telah ada dikawasan pacu jalur yaitu, turap yang biasa disebut dengan tangga batu yang dimanfaatkan untuk menyaksikan perlombaan pacu jalur dan sebagai tempat bersantai sambil menikmati wisata kuliner di kawasan pacu jalur. Jembatan beton dan jembatan gantung yang menghubungkan sisi kota dengan sisi seberang sudah ada dan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana jalan dan lampu jembatan juga telah dilengkapi. Lampu jalan disepanjang sungai juga sudah ada, walaupun ada beberapa buah bola lampu yang tidak menyala. Sarana pendukung sungai yaitu taman kota dan hutan kota yang menjadikan fisik sungai menjadi hidup, dengan adanya taman yang dekat dengan sungai, masyarakat dapat

menikmati alam sebagai tempat rekreasi di kawasan pacu jalur.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data dari aspek legal dan biofisik maka pengembangan kawasan pacu jalur sebagai waterfront city dapat dibagi dalam tiga zona pengembangan :

A. Zona Alami

Kawasan pacu jalur yang dalam pengembangan waterfront city sebaiknya dibatasi untuk lahan budidaya yang dimaksudkan sebagai daerah konservasi dengan mengadakan greenbelt sepanjang sempadan sungai. Greenbelt direncanakan dengan ketebalan maksimum sesuai dengan kondisi sempadan sehingga dapat melindungi, memperbaiki dan meningkatkan kualitas alami sungai.

Dengan perkembangan teknik lingkungan pada saat ini untuk dapat membuat kesan alami batas garis sempadan sungai dengan menggunakan live stake bioengineering. *Live stake* adalah tipe konstruksi *bioengineering* konvensional yang hanya menggunakan elemen tanaman dari jenis yang dapat memperbanyak diri melalui batang. Berfungsi utama untuk mengontrol erosi permukaan dengan cara memfilter tanah terhadap arus air dan aliran permukaan, memperkuat tegangan partikel tanah, mengintersepsi air hujan, mempertahankan daya infiltrasi tanah, selain itu juga berfungsi sebagai penyerap polutan air dan penyaring sedimentasi. Pada umumnya tanaman yang digunakan adalah jenis rerumputan karena dapat memperkecil dan memperlambat arus air sungai, mudah tumbuh dan pemeliharaannya sangat mudah.

B. Zona Semi Alami

Zona semi alami ini merupakan kawasan yang dalam pengembangan *waterfront city* sebagai kawasan *mixed-use* yaitu

pengembangan yang mengkombinasikan areal alami sebagai daerah konservasi dengan pemanfaatan lahan yang telah ada untuk kegiatan sehari – hari masyarakat. Konservasi tepi sungai dapat diaplikasikan dengan menggunakan *gabion wall* atau *live cribwall*/ kombinasi dinding krib dengan vegetasi yang merupakan tipe konstruksi *bioengineering* yang mengkombinasikan struktur perkerasan dan elemen vegetasi. Teknik ini berfungsi sebagai pelindung tepi sungai berbentuk lereng terhadap bahaya erosi, memperbaiki struktur tanah dan pengatur arah arus pada badan sungai yang berkelok. Vegetasi pada zona semi alami ini adalah vegetasi yang memiliki perakaran yang dapat menetralkan zat pencemar terutama polusi udara, perakaran tidak dangkal dan tidak muncul ke permukaan tanah, tidak menghasilkan buah yang besar dan menarik, sedikit menggugurkan daun, memiliki percabangan yang kuat, ketinggian dan besar tajuk tidak mengganggu sarana dan prasarana yang ada, dapat menjadi habitat burung dan menghasilkan aroma, mereduksi kebisingan dan debu.

Dari hasil pengamatan pengembangan kawasan zona semi alami ini dapat dilakukan di Kelurahan Pasar, Desa Koto Taluk dan Desa Seberang Taluk. Pada kondisi saat ini, taman kota yang telah ada perlu ditata kembali dan fasilitas umum untuk taman bermain anak dan Pujasera (pusat jajanan serba ada) perlu dikembangkan lagi. Pujasera juga dapat dikembangkan di tepian Sungai Kuantan, seperti warung terapung yang menyediakan makan, minum maupun cendramata khas Kota Teluk Kuantan. Tempat penyebrangan yang sekarang jarang digunakan, sebaiknya tetap dipertahankan untuk wisata air dengan menggunakan perahu mesin atau yang

dikenal dengan sebutan pompong. Untuk pengembangan zona alami dengan cara *live stake bioengineering* dapat dilakukan di Desa Pulau Aro, Desa Sawah, dan Desa Seberang Taluk Hilir. Kondisi lokasi ini memungkinkan untuk kawasan budidaya dan masih dapat dikembangkan menjadi kawasan ekowisata.

C. Zona Multi Pemanfaatan

Zona multi pemanfaatan yaitu kawasan yang dalam pengembangan *waterfront city* tetap dibiarkan sebagaimana peruntukannya saat ini yaitu sebagai kawasan perdagangan/bisnis, transportasi, dan kegiatan perkotaan lainnya. Akan tetapi pengembangan zona ini harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan sungai. Pada daerah ini perlu penanaman vegetasi pada lahan – lahan kosong di antara bangunan dan aplikasi *green building*. Penataan bangunan di sepanjang sungai dengan mengorientasikan bangunan ke arah sungai atau sebagai halaman depan. Dari hasil pengamatan, semua lokasi di kawasan pacu jalur dapat berpotensi sebagai zona multi pemanfaatan. Pengembangan kawasan ini harus memperhatikan kondisi lokasi dan daya dukung lingkungan di kawasan pacu jalur tersebut.

3.Aspek Sosial

Berdasarkan hasil kuisisioner dengan menggunakan Skala *Likert* untuk mengetahui persepsi dan preferensi masyarakat kepada seratus (100) responden di lokasi penelitian dapat dirangkum pada Tabel 3. Parameter pertanyaan dijawab dengan selang 1 sampai 5, nilai skor sesuai dengan parameter/ variabel yang ditanya. Kriteria interpretasi skor masing – masing parameter juga sesuai dengan hasil olahan kuisisioner dari responden yang diukur menggunakan Skala *Likert*.

Tabel 3. Persepsi dan Preferensi Masyarakat

No	Parameter	Nilai Persepsi dan Preferensi Masyarakat (%)					Kriteria Interpretasi skor (%)
		1	2	3	4	5	
1.	Kualitas air sungai	62	25	10	3	-	30,8
2.	Fisik sungai	46	31	20	3	-	36
3.	Fungsi sungai						
	a. Transportasi	7	19	12	14	48	75,4
	b. MCK	51	12	5	19	13	46,2
	c. Bahan baku air minum	46	28	10	4	12	41,6
	d. Wisata	1	2	5	20	72	92
	e. Perikanan sungai	4	10	12	21	53	81,8
	f. Perdagangan/bisnis	3	9	7	20	61	85,4
	g. Tempat pembuangan sampah	43	24	18	5	10	43
4.	Nilai budaya	9	4	13	22	52	80,8
5.	Nilai sejarah	4	5	17	28	46	81,4
6.	Preferensi terhadap sungai						
	a. Sungai bersih	-	-	-	22	78	95,6
	b. Fisik sungai membaik	-	-	-	31	69	93,8
	c. Tempat wisata	-	-	-	25	75	95

Sumber: Hasil olahan data kuisioner (2013) n=100 responden

Hasil penelitian dari seratus responden menunjukkan bahwa tingkat kualitas air dan fisik Sungai Kuantan berada pada kondisi negatif. Pendapat masyarakat pada lokasi penelitian mayoritas menyatakan kualitas air dan fisik Sungai Kuantan pada saat ini buruk sekali. diketahui bahwa persepsi masyarakat yang bermukim di lokasi penelitian sebesar 62% masyarakat merasakan kualitas air Sungai Kuantan dalam kondisi buruk sekali. diketahui bahwa persepsi masyarakat yang bermukim di lokasi penelitian sebesar 62% masyarakat merasakan kualitas air Sungai Kuantan dalam kondisi buruk sekali,

Penilaian masyarakat terhadap fungsi Sungai Kuantan tertinggi adalah sebagai tempat wisata, perdagangan/bisnis, perikanan sungai. Jumlah skor yang

tertinggi adalah 72% sangat setuju dengan kriteria interpretasi skor dengan selang kepercayaan 92% sangat kuat memilih fungsi sungai sebagai tempat wisata. Nilai budaya dan sejarah Sungai Kuantan bagi masyarakat sekitar sungai dianggap masih tinggi, dapat dilihat dari hasil perhitungan kuisioner 52% menjawab sangat setuju, 22% setuju, dan 13% netral. Penilaian masyarakat terhadap nilai budaya yang tinggi dalam Sungai Kuantan, dikarenakan nilai budaya di Sungai Kuantan merupakan pendukung sosial budaya di kawasan pacu jalur Teluk Kuantan dan akan mendukung pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan. Preferensi masyarakat tentang Sungai Kuantan yaitu masyarakat menginginkan sungai kembali bersih, sungai sebagai tempat wisata dan fisik sungai membaik.

4. Alternatif Strategi Pengembangan Kawasan Pacu Jalur sebagai Waterfront City Teluk Kuantan

Isu pokok dalam analisa kebijakan adalah menetapkan alternatif kebijakan. Dalam menentukan alternatif kebijakan, dengan menggunakan analisis AHP yaitu dengan menganalisis hasil kuisisioner dengan

bantuan *software expert chioce*. Metode AHP digunakan untuk mendapatkan faktor dan variabel prioritas dengan ranking/bobot tertinggi untuk masing – masing permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut yaitu dari aspek ekologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan aspek kelembagaan.

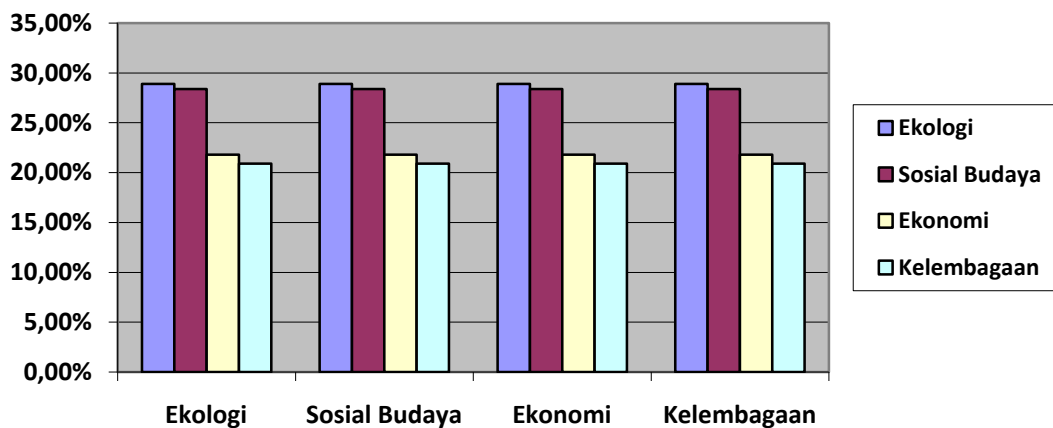
Tabel 4. Hasil Analisis AHP Alternatif Kebijakan Pengembangan Kawasan Pacu Jalur Sebagai *Waterfront city* Teluk Kuantan

Elemen	Bobot	Prioritas
Alternatif Kebijakan		
Pemberdayaan Masyarakat	0,251	1
Pengembangan Kawasan	0,211	2
Revitalisasi Sungai	0,186	3
Peningkatan Koordinasi antar stakeholder	0,163	4
Penegakan Hukum	0,106	5
Sosialisasi Kebijakan	0,083	6
Aspek		
Ekologi	0,289	1
Sosial Budaya	0,284	2
Ekonomi	0,218	3
Kelembagaan	0,209	4

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Hasil analisis AHP terhadap empat sub level aspek bahwa dalam Pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan, aspek ekologi merupakan prioritas dengan bobot tertinggi sebesar 0,289 atau dengan skala prioritas sebesar 28,9%, aspek sosial budaya 0,284 atau dengan skala prioritas sebesar 28,4%, aspek ekonomi 0,218 dengan skala

prioritas sebesar 21,8%, dan terakhir adalah aspek kelembagaan dengan bobot sebesar 0,209 dengan skala prioritas 20,9%. Nilai *inconsistency* sebesar 0,05 yaitu lebih kecil dari 0,1 maka hasilnya sudah konsisten. Nilai bobot atau skala prioritas masing – masing aspek disajikan pada Gambar 1.



Tingginya nilai bobot aspek ekologi dibandingkan aspek lainnya menunjukkan bahwa aspek ekologi menjadi perhatian yang paling utama dalam pengembangan *waterfront city* dan sangat penting dibahas dan dimasukkan dalam perencanaan pengembangan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Karena aspek ekologi merupakan sistem pendukung kehidupan untuk mempertahankan keberadaan makhluk hidup dan keberlanjutan suatu aktivitas makhluk hidup baik dibidang ekonomi maupun sosial budaya untuk jangka panjang.

Aspek kedua yang berpengaruh dalam pengembangan kawasan pacu jalur adalah aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya sangat berpengaruh dalam pengembangan *waterfront city* di kawasan pacu jalur Teluk Kuantan ini karena pada dasarnya masyarakat Kota Teluk Kuantan merupakan masyarakat yang aktivitas sosial budayanya masih sangat bergantung terhadap Sungai Kuantan. Dimana dalam pengembangan *waterfront city* ini aspek sosial budaya terutama terpeliharanya budaya lokal dan seni Pacu Jalur merupakan daya tarik masyarakat dalam maupun luar kota Teluk Kuantan sehingga tidak meninggalkan ciri khas masyarakat asli Teluk Kuantan khususnya yang berada di kawasan pacu jalur seperti prosesi adat dan budaya sebelum diadakannya Pacu Jalur sampai kegiatan pacu jalur selesai.

Sesuai dengan kriteria aspek sosial budaya yang kedua adalah terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar Teluk Kuantan maupun masyarakat Kuantan Singingi dengan adanya pengembangan kawasan *waterfront city*. Kriteria selanjutnya yaitu diharapkan dengan adanya pengembangan *waterfront city* di kawasan pacu jalur dapat tercipta atau terjadinya perubahan perilaku masyarakat, terutama masalah kebersihan Sungai Kuantan.

Aspek ketiga yang berpengaruh dalam pengembangan *waterfront city* ini adalah aspek ekonomi. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait aspek ekologi, namun juga pembangunan ekonomi dan sosial yang dikenal dengan *the living triangel*. Ekologi dapat dijaga dengan baik bila kondisi sosial dan ekonomi masyarakat mendukung. Oleh karena itu, dalam pengembangan *waterfront city* aspek ekonomi harus tetap diperhatikan, dalam artian bahwa dengan pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan, ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih baik yang tentunya akan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

Aspek keempat yang berpengaruh dalam pengembangan *waterfront city* ini adalah aspek kelembagaan. Kelembagaan merupakan ujung tombak pengembangan

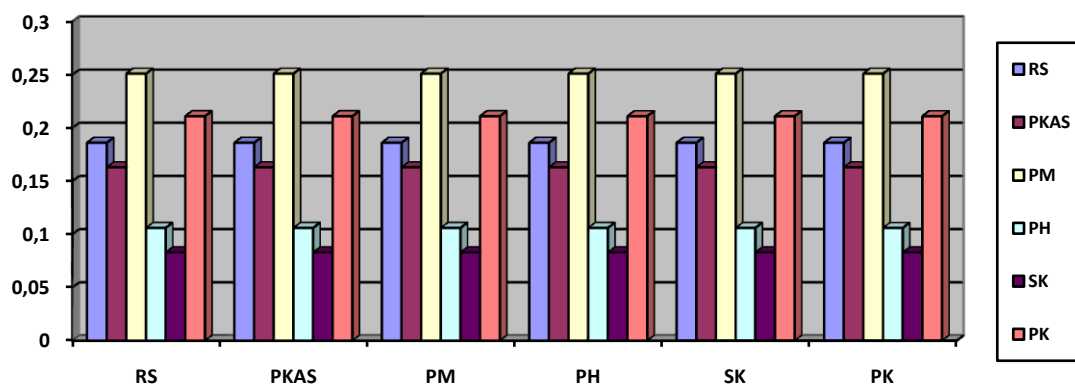
waterfront city. Apabila kelembagaan atau instansi yang terkait dalam pengelolaan Sungai Kuantan di Kawasan Pacu Jalur Teluk Kuantan, bekerjasama dengan koordinasi yang baik maka pengembangan *waterfront city* dapat dilakukan secara optimal.

5.Level Alternatif Strategi Pengembangan Kawasan Pacu Jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan

Alternatif kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan yang dapat menyumbang pada

pencapaian nilai – nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Berkaitan dengan sasaran – sasaran yang ingin dicapai dari berbagai aspek dalam pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan, maka ada beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan yaitu : Pemberdayaan masyarakat, Pengembangan kawasan, Revitalisasi sungai, Peningkatan koordinasi antar *stakeholders*, Penegakan hukum, dan Sosialisasi kebijakan

Nilai bobot/skala prioritas alternatif strategi pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan disajikan pada Gambar 2.



Alternatif strategi pengembangan yang merupakan prioritas utama adalah pemberdayaan masyarakat dengan bobot nilai sebesar 0,251 atau dengan skala prioritas 25,1%, pengembangan kawasan dengan bobot nilai sebesar 0,211 atau skala prioritas 21,1%, revitalisasi sungai dengan nilai bobot sebesar 0,186 atau skala prioritas 18,6%, peningkatan koordinasi antar *stakeholders* mempunyai bobot nilai sebesar 0,163 atau skala prioritas 16,3%, penegakan hukum nilai bobot sebesar 0,106 atau skala prioritas 10,6%, dan yang terakhir adalah sosialisasi kebijakan dengan nilai bobot 0,083 atau skala prioritas 8,3%. Nilai inconsistensi sebesar 0,02 yaitu lebih kecil dari 0,1 maka hasilnya sudah konsisten. Namun

demikian berhubung bobot nilai antar alternatif strategi tidak berbeda jauh mengindikasikan bahwa semua alternatif tersebut penting dan saling terkait.

1. Alternatif strategi pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Definisi pemberdayaan masyarakat menurut Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Kementerian Kehutanan (PJLWA Kemenhut) adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk terus meningkatkan keberdayaan masyarakat, untuk memperbaiki kesejahteraan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam

segala kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara

berkelanjutan.

2. Pengembangan Kawasan

Alternatif strategi Pengembangan Kawasan Pacu Jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan yang kedua adalah Pengembangan kawasan. Pengembangan kawasan tersebut adalah pengembangan kawasan pacu jalur di Sungai Kuantan dengan pengelolaan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan kawasan secara berkelanjutan dengan menjaga ekosistem disekitar kawasan yang akan dikembangkan. Berdasarkan wawancara dengan responden yang ahli, pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan, lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu Desa Seberang Taluk. Desa Seberang Taluk merupakan salah satu desa yang dimanfaatkan sebagai arena pacu jalur. Sebagian besar kawasan pacu jalur ini berada di Desa Seberang Taluk. Desa Seberang Taluk mempunyai potensi untuk mendukung pengembangan *waterfront city* dengan berbagai sarana pendukung yang akan direncanakan oleh salah satu informan yaitu Kepala Desa Seberang Taluk, seperti program Desa Seberang Taluk pada saat ini adalah mengembangkan Tri Agro, yaitu pengembangan agribisnis, agroindustri, dan agrowisata. Pengembangan kawasan Tri Agro ini merupakan salah satu alternatif yang dapat mendukung pengembangan kawasan *waterfront city* Teluk Kuantan.

3. Revitalisasi Sungai

Kegiatan yang biasanya dilakukan dalam revitalisasi sungai antara lain : pengerasan dinding sungai, pembuatan tanggul dan pengerukan serta penghilangan tumbuhan, lumpur, pasir, dan bantuan di kiri kanan sungai akan dapat memberikan dampak negatif bagi

ekologis sungai seperti hilangnya berbagai kemampuan dan potensi daerah ekoton dalam mengontrol aliran energi dan nutrien yang diperlukan bagi biota yang hidup di sungai. Hilangnya daerah ekoton akhirnya berdampak pada manusia sendiri karena terjadi banjir di hilir, erosi di dasar sungai yang menyebabkan longsor dan sedimentasi atau pendangkalan di hilir karena tererosinya material sepanjang sungai, serta terputusnya daur kehidupan pendukung ekosistem

4. Peningkatan koordinasi antar stakeholders

Alternatif strategi pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan yang keempat adalah peningkatan koordinasi antar *stakeholders*. Koordinasi berasal dari kata Bahasa Inggris *coordination* yang berarti *being co-ordinate*, yaitu adanya koordinat yang bersamaan dari dua garis dalam bidang datar, yang dapat diartikan bahwa dua garis yang berpotongan pada koordinat tertentu. Koordinasi adalah bekerja bersama seerat-eratnya dibawah seorang pemimpin. Koordinasi kegiatan vertikal di daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna. Peningkatan koordinasi antar *stakeholders* perlu ditingkatkan agar berbagai kepentingan dari masing-masing *stakeholders* dapat diakomodasi dalam pengembangan *waterfront city*. BAPPEDA Kabupaten Kuantan Singingi sangat berperan dalam mengkoordinasikan rencana

pengembangan *waterfront city* kepada seluruh instansi yang terkait. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara BAPPEDA dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi, serta instansi yang terkait dengan pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* sangat diperlukan agar dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pengembangan *waterfront city* dapat lebih terarah.

5. Penegakan hukum

Alternatif strategi pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan yang kelima adalah Penegakan Hukum beserta regulasinya. Definisi penegakan hukum secara luas menurut Hamzah (1997), meliputi kegiatan preventif yang meliputi negosiasi, sipervisi, penerangan dan nasehat, dan represif yang meliputi mulai dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, sampai penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan lingkungan. Urutan siklus pengaturan perencanaan kebijakan yakni : 1) perundang-undangan (*legislation*); 2) penentuan standar (*standard setting*); 3) pemberi izin (*lizensing*); 4) penerapan (*implementation*); dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Lemahnya penegakan hukum yang berhubungan dengan Sungai Kuantan ini dapat dilihat dari masih ada pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai, serta lemahnya instansi daerah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup untuk menindaklanjuti masyarakat atau kelompok yang melakukan aktivitas penambangan galian C dipinggir Sungai Kuantan dan aktivitas PETI dari hulu sungai dan beberapa anak sungai, serta sampah yang masih dibuang ke sungai

maupun di kumpulkan di tebing sungai. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam pengembangan *waterfront city*. Penegakan hukum ini diberlakukan terhadap kegiatan – kegiatan pemanfaatan Sungai Kuantan baik dari hulu hingga hilir, sempadan sungai maupun badan sungai, untuk menciptakan kawasan pacu jalur yang bersih dan keberadaan sungai tetap terjaga.

6. Sosialisasi kebijakan

Dalam pembuatan kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Tahap-tahap dalam kebijakan tersebut yaitu : Penyusunan agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi kebijakan, Implementasi kebijakan, dan Evaluasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap program atau kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan sudah final, maka kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi program atau kebijakan tersebut. sosialisasi diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengerti apa saja kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam suatu program. Dan tentunya sosialisasi ini diharapkan mampu menjalin komunikasi antar pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya dalam pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* Teluk Kuantan. Kebijakan – kebijakan program yang telah ditetapkan atau disusun oleh pemerintah daerah dari instansi yang terkait, wajib menyampaikannya

kepada masyarakat dengan cara sosialisasi. Sosialisasi dapat dilakukan tidak hanya dengan rembug atau mengumpulkan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga bisa menggunakan media seperti iklan di radio ataupun selebaran pengumuman yang ditempel maupun disebar.

KESIMPULAN

1. Dari aspek legal hanya Desa Koto Taluk yang memenuhi aspek legal baik sempadan yang bertanggung maupun tidak bertanggung. Garis sempadan sungai yang tidak bertanggung disetiap lokasi selain Desa Koto Taluk tidak memenuhi kriteria aspek legal. Sedangkan garis sempadan sungai bertanggung yang memenuhi aspek legal selain Desa Koto Taluk adalah Desa Sawah, Seberang Taluk, dan Kelurahan Pasar.
2. Dari aspek biofisik maka pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* di Teluk Kuantan dibagi menjadi tiga zona, yaitu: zona alami, zona semi alami, dan zona multi pemanfaatan.
3. Dari aspek sosial prefrensi masyarakat terhadap Sungai Kuantan yang paling prioritas adalah sungai kembali bersih, sungai sebagai tempat wisata, dan fisik sungai kembali membaik.
4. Alternatif strategi dalam pengembangan kawasan pacu jalur sebagai *waterfront city* adalah a) Pemberdayaan masyarakat; b) Pengembangan kawasan; c) Revitalisasi sungai; d) Peningkatan koordinasi antar *stakeholders* ; e) Penegakan hukum; serta f) Sosialisasi kebijakan. Alternatif strategi

pengembangan yang merupakan prioritas utama adalah pemberdayaan masyarakat, namun demikian berhubung bobot nilai antar alternatif strategi tidak berbeda jauh mengindikasikan bahwa semua alternatif strategi tersebut penting dan saling terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada responden ahli sebagai informan maupun responden dari masyarakat yang telah memberikan data dan informasi tentang Sungai Kuantan dan Kebijakan waterfront city serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharsono., S. 2005. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Riduan., 2002. *Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Rustiadi.E., 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Saaty, L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Setiawati, H., 2011. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan PUSTELING Menggunakan*

*Strategi Pengembangan Kawasan Pacu Jalur
Sebagai Waterfront City Teluk Kuantan*

Metode Proses Hirarki Analitik
(PHA). Tesis. IPB.

Salim, E., 1991 . *Pembangunan
Berwawasan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta.